

2019

LAPORAN KINERJA



Pemerintah Aceh - Dinas Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR



Fokus agenda kerja Pemerintah Aceh sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019 yaitu “Memacu pengembangan kawasan strategis dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”. Belanja pemerintah diefektifkan sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh yaitu pengembangan kawasan strategis, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM dalam meningkatkan daya saing, serta memacu pertumbuhan ekonomi terutama bidang kelautan dan perikanan.

Untuk mendukung hal tersebut, DKP Aceh telah melaksanakan berbagai program sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2019. Pencapaian Program diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas. Guna memastikan target IKU tercapai, DKP Aceh melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Gubernur Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai bentuk peran aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Seluruh kebijakan yang dilaksanakan tahun 2019 merupakan penjabaran dari 2 misi gubernur Aceh, yang dalam sistem pengelolaan kinerjanya ditetapkan dalam 5 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2019 termasuk capaian target beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang

dihadapi dalam pencapaian target tahun 2019, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh akan menjadi modal utama peningkatan kinerja. Disamping itu, keras jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta dukungan lintas sektor, instansi terkait lainnya, seluruh pemangku kepentingan akan menjadikan sinergi pencapaian target pada tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih

Banda Aceh, Februari 2020
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Dr. Ir. ILYAS, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	01
1.1. Latar Belakang	01
1.2. Maksud dan Tujuan	02
1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh	02
1.4. Sumber Daya Manusia DKP Aceh	04
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh	06
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	08
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022	10
2.2. Indikator Kinerja Utama	15
2.3. Penetapan Kinerja	15
2.4. Program Instansi	16
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Capaian Kinerja	20
3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja	21
3.3. Kinerja Keuangan	39
BAB 4. PENUTUP	42
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

1.1. Rincian ASN dan Tenaga Kontrak DKP Aceh Berdasarkan Jabatan	04
1.2. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan	05
1.3. Rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan	05
2.1. Visi dan Misi Pemerintahan Aceh, Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan	13
2.2. Perjanjian Kinerja DKP Aceh Tahun 2019	16
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama DKP Aceh Tahun 2019	20
3.2. Perkembangan Capaian NTN Tahun 2017-2019	23
3.3. Perkembangan Capaian NTPi Tahun 2017-2019	24
3.4. Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2017-2019	27
3.5. Capaian Produksi Perikanan 2017-2019	28
3.6. Rincian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2019 Menurut Komoditas	
Utama (Ton)	29
3.7. Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017-2019 (Ton)	30
3.8. Volume Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2017-2019 (Ton)	31
3.9. Rincian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016-2019 Menurut Komoditas	
Utama (Ton)	32
3.10. Capaian Produksi Garam Tahun 2017-2019 (Ton)	33
3.11. Jumlah Produksi Garam (Ton) Per Kabupaten Sentra Garam Aceh	34
3.12. Capaian Nilai Ekspor Perikanan Aceh Tahun 2019	35
3.13. Capaian Luas Kawasan Konservasi (Ha)	37
3.14. Capaian Rasio Luas Kawasan Terhadap Perairan Teritorial (%)	38
3.15. Capaian Rasio Luas Kawasan Terhadap Perairan Teritorial (%)	39
3.16. Capaian Nilai Kinerja Anggaran DKP Aceh Tahun 2019	39
3.17. Pagu Dan Realisasi APBA DKP Aceh Tahun 2016-2019	40

DAFTAR GAMBAR

3.1. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tahun 2017-2019	23
3.2. Peningkatan Sarpras Pelabuhan dan Bantuan Alat Tangkap Tahun 2019	24
3.3. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Selama Tahun 2017-2019	25
3.4. Bantuan Bioflok, Benih Dan Pakan Pada Program Budidaya Tahun 2019.....	26
3.5. Kegiatan Gemarikan dalam Meningkatkan Konsumsi Ikan di Aceh	28
3.6. Perkembangan Produksi Perikanan Selama Tahun 2016-2019	29
3.7. Pelaksanaan Integrasi Lahan Garam di Tahun 2019	34
3.8. Realisasi Apba DKP Aceh 2019 Per Jenis Belanja	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	45
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019	46
3. Penghargaan Tahun 2019	47

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Aceh. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Qanun Aceh No 1 Tahun 2019 tentang RPJMA 2017-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sepanjang tahun 2019, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa indikator Kinerja utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2020 disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan. Secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis DKP Aceh Tahun 2019 sebesar 97,65%.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Dari 7 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2019, terdapat 3 IKU (42,86%) yang pencapaiannya melebihi target, 4 IKU (57,14%) yang belum dapat mencapai target.
2. IKU yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan (capaian > 100%) adalah: 1). Nilai tukar nelayan, 2). Konsumsi ikan, 3). Produksi perikanan.
3. 4 IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah: 1). Nilai tukar pembudidaya ikan, 2). Produksi garam, 3). Nilai ekspor perikanan dan 4). Luas kawasan konservasi perairan.

Kinerja keuangan DKP Aceh tahun 2019 dilaksanakan melalui pelaksanaan 11 program dalam APBA DKP Aceh Tahun 2019. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DPA Awal terbit

sebesar Rp. 417,9 milyar dan terdapat pengurangan sebesar Rp. 6,4 milyar pada DPA perubahan. Sampai dengan akhir tahun 2019 dapat direalisasi sebesar 79,91%. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan DKP Aceh tahun 2019 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders kelautan dan perikanan.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur Aceh.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2019 terdapat 7 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan Aceh. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, DKP Aceh melaksanakan 11 (sebelas) program pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh 8 Unit Kerja Eselon III di lingkup DKP Aceh.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian

Kinerja antara Kepala Dinas dengan Eselon III dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai.

Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) DKP Aceh tahun 2019 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran DKP Aceh. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja DKP Aceh Tahun 2019 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran DKP Aceh selama tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi DKP Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh nomor 125 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Tugas DKP Aceh adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh.

Dalam melaksanakan tugas tersebut DKP Aceh menyelenggarakan fungsinya :

- A. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- B. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;

- C. Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- D. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- E. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- F. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- G. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- H. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- I. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- J. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- K. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- L. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- M. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

- N. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- O. Pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- P. Pembinaan UPTD; dan Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

1.4. Sumber Daya Manusia DKP Aceh

Susunan kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh hingga tahun 2019 sebanyak 337 orang yang terdiri dari 34 orang pejabat struktural dengan persentase 10,09%, 197 orang staf PNS dengan persentase 58,45%, 1 orang pejabat fungsional 0,30%, dan 105 orang staf tenaga kontrak dengan persentase 31,16%. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut.

TABEL 1.1. RINCIAN ASN DAN TENAGA KONTRAK DKP ACEH BERDASARKAN JABATAN

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Struktural	34	10,09%
2.	Staf PNS	197	58,45%
3.	Fungsional	1	0,30%
4.	Staf Tenaga Kontrak	105	31,16%
	Jumlah	337	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2019

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebanyak 237 orang, terdiri dari golongan IV sebanyak 18 orang, golongan III sebanyak 154 orang, golongan II sebanyak 61 orang, dan golongan I sebanyak 4 orang . Lebih jelasnya jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut.

TABEL 1.2. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
IV	24	10,34%
III	163	50,46%
II	41	17,67%
I	4	1,72%
Jumlah	232	100

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2019

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, secara persentase terlihat bahwa jumlah PNS yang terbesar berada pada golongan III sebesar 50,46%, golongan II sebesar 17,67%, golongan IV sebesar 10,34%, dan yang paling rendah golongan I sebesar 1,72%. Pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki persentase tertinggi pada Golongan III sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk menunjang peningkatan golongan ke jenjang yang lebih tinggi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh didukung oleh sejumlah aparatur yang memiliki disiplin ilmu dalam berbagai bidang dan strata pendidikan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Disiplin ilmu sesuai dengan keahlian dan strata pendidikan pada sumber daya manusia penting untuk diperhatikan agar terciptanya kinerja yang efektif, efisien dan berintegrasi. Persentase strata pendidikan pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang terbanyak pada jenjang S1 sebesar 56,03%, dan yang paling sedikit adalah persentase jenjang SD sebesar 0,43%. Persentase strata pendidikan yang lebih tinggi perlu ditingkatkan lagi untuk menghasilkan Sumber daya manusia yang berkualitas. Rincian jumlah dan persentase pegawai negeri sipil berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1.3. berikut.

TABEL 1.3. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PENDIDIKAN

Strata Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
S3	2	0,86%
S2	46	19,83%
S1	130	56,03%
D4	3	1,29
D3	4	1,72%

Strata Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SLTA	43	18,53%
SMP	3	1,29%
SD	1	0,43%
Jumlah	232	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian, DKP Aceh, 2019

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Aceh

A. Potensi

Provinsi Aceh merupakan daerah yang terletak di ujung bagian barat pulau Sumatera yang dikelilingi oleh lautan yaitu Samudera Hindia di wilayah barat-selatan Aceh, serta Selat Malaka dan Perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh. Panjang pantai Aceh mencapai 2.666,27 Km dan luas perairan laut Aceh mencapai 295.370 km². Meninjau luasnya wilayah perairan laut Aceh, maka diprediksikan bahwa masih luas wilayah perairan yang belum tereksplorasi sehingga potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh masih besar.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Aceh diperkirakan sebesar 272,7 ribu ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah aceh dan perairan (ZEE). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut baru dimanfaatkan sebesar 208 ribu ton pada tahun 2017 atau baru 76%. Komoditas unggulan yang banyak terdapat di perairan Aceh adalah jenis ikan pelagis besar dan kecil seperti tuna, tongkol, cakalang, tenggiri, kembung, layang, siro, dan tembang; ikan demersal seperti kurisi, bawal putih, gulamah, kuro dan udang; ikan karang seperti kerapu, ekor kuning dan ikan kakap; lobster, kepiting, rajungan dan cumi-cumi juga menghiasi sepanjang perairan Aceh. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Perairan laut Aceh juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Aceh yang memiliki potensi ekonomi namun belum dikelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea water) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut

selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Selain itu, Aceh juga memiliki potensi perikanan budidaya yang besar, mencapai 55.896 ha (tidak termasuk potensi budidaya laut) yang terdiri dari budidaya payau 50.691,70 ha, dan budidaya air tawar 5.204,3 ha (Aceh Dalam Angka 2016). Pada tahun 2017, produktifitas perikanan budidaya di provinsi Aceh masih sangat rendah. Dimana produktifitas perikanan budidaya payau (tambak) hanya sebesar 0,74 ton/ha, dan produktifitas perikanan budidaya air tawar hanya 0,67 ton/ha untuk media sawah dan 5,40 ton/ha untuk media kolam.

Potensi rumput laut di Aceh sebenarnya sangat besar. Namun sayang, umumnya rumput laut masih dipandang sebagai tumbuhan liar. tumbuhan algae laut berkualitas unggul tumbuh subur secara liar dan di beberapa wilayah pantai daratan dan kepulauan di Aceh. Apalagi rumput laut sedang booming di pasar internasional, praktis berpeluang besar dan jadi salah satu sektor usaha baru untuk menjawab carut-marutnya perkenomian masyarakat pesisir. Padahal pasar ekspornya cukup besar. Melihat tampilan teluk Pulau Simeulue dan Pulo Aceh, sangat cocok dijadikan daerah budidaya rumput laut, karena berada di laut lepas dengan pantai yang relatif bersih. Bahkan terdapat satu jenis rumput laut yang termasuk langka, yaitu di Lhok Bubon (Aceh Barat). Masyarakat setempat menyebutnya dengan lada laot karena buahnya seperti lada. Pengelolaan dan pemasaran rumput laut ini masih tradisional.

B. Permasalahan

Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Aceh yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.

Beberapa wilayah perairan laut Aceh sering terjadi praktik-praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan

Perikanan Aceh (WPP 571 dan WPP 572), baik oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh belum memadai.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional ($\pm 80\%$). Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai daerah yang memiliki panjang pantai 2.666,27 Km, sudah seharusnya kebutuhan garam daerah dapat dipenuhi dari produksi. Saat ini produksi garam daerah belum dapat memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj DKP Aceh Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
- B. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis DKP Aceh 2017-2022 dan perjanjian kinerja tahun 2019;
- C. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan DKP Aceh tahun 2019;
- D. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja DKP Aceh dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 memberi mandat bahwa arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, memuat visi dan misi Gubernur Aceh yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh, visi pembangunan diarahkan untuk ***“Terwujudnya Aceh Yang Damai Dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil Dan Melayani”***. Visi tersebut dilakukan dengan pelaksanaan 2 misi pembangunan kelautan dan perikanan yaitu : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan; dan Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan pada tema tahun 2019 adalah ***“Memacu pengembangan kawasan strategis dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”*** sehingga diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan visi, misi Pemerintah Aceh, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dalam mensukseskan visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan program sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dan dibatasi oleh ruang waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan tersebut harus merefleksikan bagaimana visi dan misi pemerintah Aceh yang terkait dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan

Aceh dapat terealisasi dengan baik. Tujuan jangka menengah pelayanan DKP Aceh yang telah dirumuskan yaitu :

1. Menurunnya angka kemiskinan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui sektor kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan tatakelola lingkungan hidup lestari.

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dirumuskan sasaran yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga menjadi alat pemicu terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu kepada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPJMA 2017 - 2022. Adapun sasaran yang terkait dengan tupoksi DKP Aceh yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA 2017-2022) yaitu:

1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan;
2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan;
3. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan;
4. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan;
5. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

C. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang berisikan program-program unggulan untuk mencapai sasaran, strategi juga dapat dijadikan sarana dalam melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi yang yang dicanangkan yaitu :

1. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar nelayan;
2. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;

3. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan;
4. Mendesain regulasi dan sistem logistik yang baik;
5. Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perikanan;
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan;
7. Penguatan kapasitas budidaya perikanan;
8. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok;
9. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran;
10. Peningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan;
11. Peningkatan kualitas kawasan konservasi laut dan pesisir;
12. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan;
13. Memberantas pelanggaran IUU Fishing;
14. Perencanaan zonasi tataruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

D. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan. Terdapat 10 (sepuluh) misi pemerintah Aceh yang telah dirumuskan, dan 2 (dua) diantaranya selaras dengan program-program unggulan yang telah dirangkum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam arah kebijakan. Adapun arah kebijakan tersebut yaitu :

1. Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
2. Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan;
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
4. Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan;
5. Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi perikanan berbasis kawasan;
6. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan;
7. Meningkatkan kemandirian dalam pembudidayaan perikanan;
8. Membangun kawasan unggulan perikanan;
9. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan dan tatakelola kesyahbandaran;
10. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan;

11. Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi habitat mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
12. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan;
13. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum;
14. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

TABEL 2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAHAN ACEH, TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIAJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI			
MISI 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Angka Kemiskinan	1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan 2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	1. Peningkatan indeks yang diterima sekaligus pengendalian indeks yang dibayar nelayan 2. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan 3. Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan 4. Mendesain regulasi dan sistem logistik yang baik	1. Mengembangkan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan 2. Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4. Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan
Meningkatkan pertumbuhan	1. Meningkatkan produksi	1. Peningkatan produksi dan	1. Meningkatkan produksi,

ekonomi Aceh melalui Sektor Kelautan dan Perikanan	2. Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	produktifitas komoditi perikanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautaan dan perikanan 3. Penguatan kapasitas budidaya perikanan 4. Pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan lhok 5. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran 6. Peningkatan pengelolaan sumberdaya ikan	produktifitas dan nilai tambah komoditi perikanan berbasis kawasan 2. Membangun sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan 3. Meningkatkan kemandirian dalam pembudidayaan perikanan 4. Membangun kawasan unggulan perikanan 5. Meningkatkan pengelolaan pelabuhan perikanan dan tatakelola kesyahbandaran 6. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
MISI 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	1. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	1. Peningkatan kualitas kawasan konservasi laut dan pesisir 2. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan pengendalian dan rehabilitasi habitat mangrove, terumbu karang dan padang lamun 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

		3. Memberantas pelanggaran IUU Fishing 4. Perencanaan zonasi tataruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Sumberdaya Kelautan 3. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum 4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir
--	--	---	--

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, maka Dinas kelautan dan Perikanan Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN);
2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi);
3. Konsumsi ikan;
4. Produksi perikanan;
5. Produksi Garam;
6. Nilai Ekspor Perikanan;
7. Luas kawasan konservasi perairan.

2.3. Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja DKP Aceh tahun 2019, secara rinci sebagai berikut:

TABEL 2.2. PERJANJIAN KINERJA DKP ACEH TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,75
		2	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	98,50
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	3	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	53,60
3	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	4	Produksi Perikanan (ton)	313.786,79
			- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	205.741,00
			- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	108.045,79
		5	Produksi Garam (ton)	19.647,94
4	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	6	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	3.250.000,00
5	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	7	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	212.618,89

2.4. Program Instansi

Untuk mencapai kinerja DKP Aceh tahun 2019 tersebut, rencana kerja dilakukan melalui 11 program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Pekantoran

Program ini bertujuan terlaksananya penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi perkantoran dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi perkantoran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sasarannya untuk mendukung pelaksanaan kinerja aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk pengendalian kedisiplinan aparatur sipil dalam pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program meningkatnya persentase capaian disiplin aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan kinerja aparatur dalam pengendalian akuntabilitas kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program meningkatnya persentase capaian kinerja aparatur melalui peningkatan nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis.

E. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul, Pengembangan Perbenihan Perikanan, Pembinaan dan Pembudidayaan ikan, Pengembangan sarana dan prasarana Budidaya Air Tawar, Pengembangan sarana dan prasarana Budidaya Air Payau, Pengembangan sarana dan prasarana Budidaya Air Laut.

F. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Alat

Bantu Penangkapan Ikan, Pembinaan kelembagaan dan SDM nelayan, pengadaan armada kapal perikanan, pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara IDI, pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo dan Penyedia sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.

G. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan produk olahan hasil perikanan yang dipasarkan baik pasar domestik maupun internasional dan menjamin akan keamanan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sasaran yaitu meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu keamanan hasil perikanan. Kegiatan Pengembangan Laboratorium Pengujian Mutu Perikanan.

H. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan di pulau pulau kecil melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pembinaan kluster garam dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil.

I. Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Perikanan

Tujuan program adalah meningkatnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, rata-rata konsumsi ikan per kapita daerah, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Kelautan dan Peningkatan efisiensi sistem logistik perikanan Aceh.

J. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam menjaga kelestarian dan pengawasan lingkungan dari kerusakan yang tidak bertanggungjawab dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan kawasan konservasi secara lestari dengan sasaran peningkatan kawasan konservasi perairan. Selain itu, sasarannya adalah Perairan Aceh bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan, Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing, Pengelolaan pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil dan Rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.

K. Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi

Tujuan program adalah meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial perencanaan bidang kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran. Capaian penilaian Sasaran Strategis DKP tahun 2019 sebagai berikut :

TABEL 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DKP ACEH TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,75	101,90	102,16
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	98,50	92,51	93,92
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	53,60	58,97*	110,02
3	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	Produksi perikanan (ton)	313.786,91	316.483,63*	100,86
		Produksi perikanan Tangkap (ton)	205.741,12	209.174,39*	101,67
		Produksi perikanan Budidaya (ton)	108.045,79	107.309,24*	99,32
		Produksi garam (ton)	19.647,94	14.591,00*	74,26
4	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	3.250.000	2.986.439	91,89
5	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	212.618,89	150.331,32**	70,70

Keterangan : * angka semata ** angka sangat semata

Capaian kinerja secara umum pada tahun 2019 telah menunjukkan capaian sebagaimana yang diharapkan. Dari 5 Sasaran Strategis (SS) terdapat 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dari 7 indikator tersebut terdapat 3 yang capaiannya $\geq 100\%$ (bernotifikasi hijau), yaitu Nilai Tukar Nelayan, konsumsi ikan, produksi perikanan. Untuk indikator kinerja utama yang tidak tercapai di tahun 2019 (bernotifikasi merah dan kuning) sebanyak 4 indikator antara lain : Nilai Tukar Pembudidaya ikan, produksi garam, nilai ekspor perikanan dan luas kawasan konservasi perairan. Namun demikian, jika ditelusuri lebih lanjut, terdapat beberapa indikator kinerja utama Dinas yang mengalami kecenderungan positif/kenaikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

3.2. Analisa dan Evaluasi Kinerja

Analisis capaian kinerja DKP Aceh tiap Sasaran Strategis untuk setiap indikator kinerja utama untuk menjelaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan kedepan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan SKPA. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan

Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat Aceh, dalam kaitan ini DKP Aceh senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan dan pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya sehingga mampu meningkatkan pendapatannya. Pendapatan merupakan total pendapatan per orang nelayan/pembudidaya yang dari aktivitas penangkapan ikan atau budidaya yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja diperoleh dalam 1 (satu) bulan.

Sasaran strategis meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, memiliki dua IKU (Indikator Kinerja Utama), yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi).

Nilai Tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi

nelayan/pembudidaya ikan (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat digunakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan. Nilai tukar dirumuskan jika lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dan sebaliknya, apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan, oleh sebab itu Nilai Tukar bisa dipergunakan sebagai indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan.

Apabila dilihat dari capaiannya di tahun 2019, maka capaian Nilai Tukar di atas angka 100 dan telah melampaui target tahun 2019 adalah untuk nelayan sedangkan pembudidaya ikan masih di bawah angka 100 dan masih belum mencapai target tahun 2019, yang antara lain disebabkan harga pakan yang merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%) masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan masih perlu diberikan bantuan pemerintah atau stimulan ekonomi utamanya untuk mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan jumlah produksi dengan harga jual yang menguntungkan atau meningkatkan efisiensi, yang pada ujungnya akan meningkatkan daya beli pembudidaya ikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.



NTN 1 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur pendapatan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang

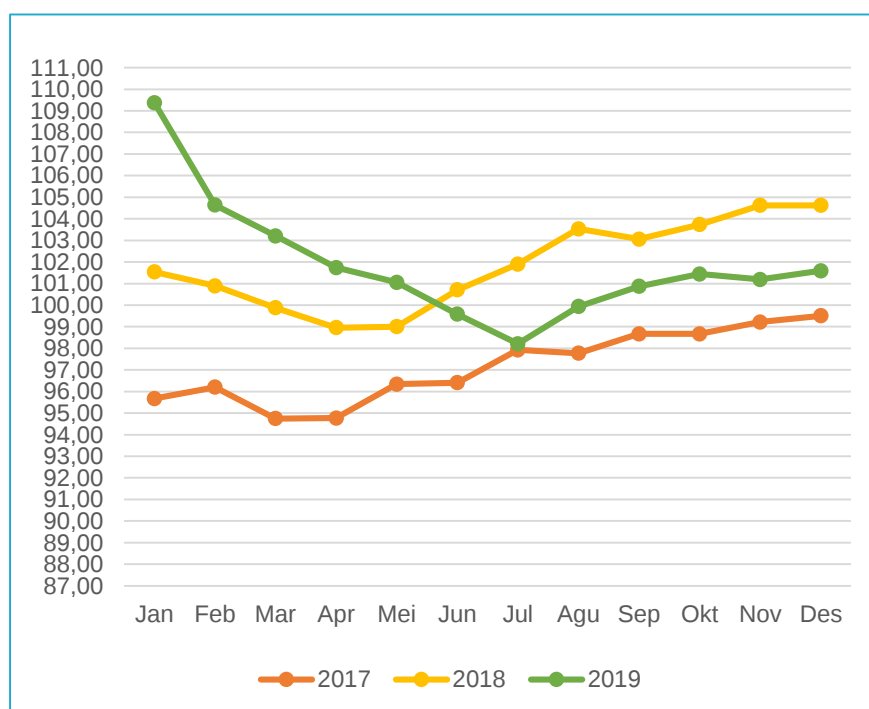
dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh. Realisasi NTN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 97,16, tahun 2018 sebesar 101,87 dan tahun 2019 sebesar 101,90 atau mencapai 102,16% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2019 yaitu sebesar 99,75.

TABEL 3.2. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTN TAHUN 2017-2019

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-1		Nilai Tukar Nelayan (NTN)					
REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019			% KENAIKAN 2018-2019	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
97,16	101,87	99,75	101,90	102,16	0,03	106,00	96,14

Sumber : BPS Aceh, angka sementara

Sedangkan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 106, maka capaian tahun 2019 baru mencapai sebesar 96,14 persen.



GAMBAR 3.1. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN (NTN) SELAMA TAHUN 2017-2019

Selama tahun 2019, NTN mengalami fluktuatif dengan nilai tertinggi pada bulan Januari 2019 dengan nilai mencapai 109,37. Tren naiknya NTN

disebabkan naiknya indeks pendapatan nelayan yang disebabkan adanya musim ikan. Sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Juli 2019 yaitu sebesar 98,21 yang dipengaruhi oleh faktor cuaca. Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama tiga tahun terakhir (2017 s.d 2019) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut,

dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,6%, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang tidak signifikan sebesar 0,03.

Keberhasilan pencapaian target NTN merupakan dampak peningkatan volume dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan cenderung stabil sepanjang tahun, dimana komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar, dan juga tingkat inflasi berpengaruh terhadap meningkatnya capaian NTN.

Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi, bantuan alat tangkap kepada kelompok nelayan seperti rumpom laut dalam dan GPS, merupakan upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nelayan.

GAMBAR 3.2. PENINGKATAN SARPRAS PELABUHAN DAN BANTUAN ALAT TANGKAP TAHUN 2019



IKU 2

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) merupakan alat ukur pendapatan pembudidaya yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh pembudidaya dengan harga yang dibayarkan oleh pembudidaya. Angka capaian NTPi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh yang diolah oleh DKP Aceh.

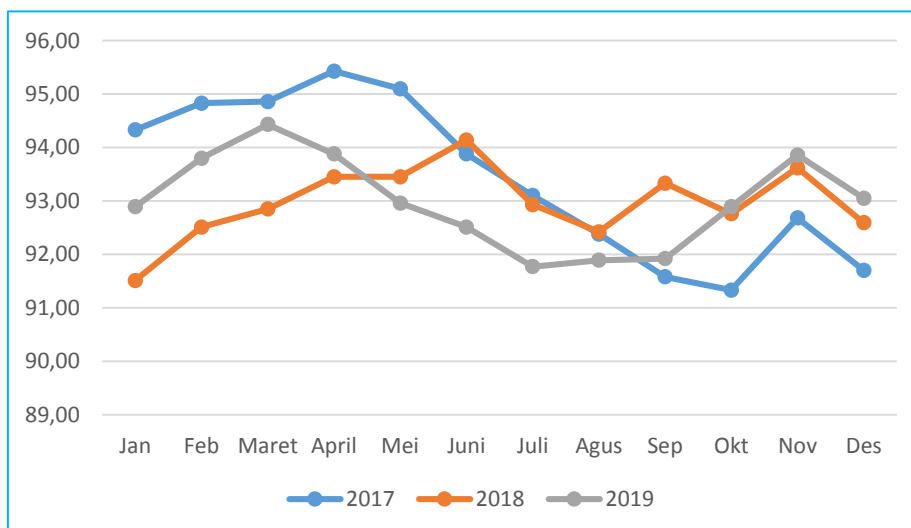
TABEL 3.3. PERKEMBANGAN CAPAIAN NTPi TAHUN 2017-2019

Sasaran Strategis-1		Meningkatkan Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
IKU-2		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)					
REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019			% KENAIKAN 2018-2019	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
93,43	92,96	98,00	92,99	94,89	0,03	103,00	90,28

Sumber : BPS Aceh, angka sementara

Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) pada tahun 2019 mencapai sebesar 92,99 atau sebesar 94,89 persen dari target. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2022 yang besarnya 103, maka capaian tahun 2019 baru mencapai sebesar 90,28 persen. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya 92,96 hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 0,03 persen. Belum tercapainya target NTPi tahun 2019 disebabkan karena peningkatan margin keuntungan penjualan ikan sebagai akibat dari semakin turunnya biaya produksi karena penggunaan pakan mandiri juga dibarengi dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan indeks bayar konsumsi rumah tangga juga meningkat.

GAMBAR 3.3. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA IKAN (NTPi) SELAMA TAHUN 2017-2019



Selama tahun 2019, NTPi mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertinggi pada bulan November 2019 dengan nilai mencapai 93,86. Sedangkan nilai

terendah terjadi pada bulan Agustus 2019 yaitu sebesar 91,89. Nilai Tukar Pembudiaya Ikan (NTPi) selama tiga tahun terakhir (2017 s.d 2019) menunjukkan realisasi yang fluktuatif dengan tren sebagai berikut dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,5%, dan tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,02%.

Penyebab kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan bantuan pemerintah pakan mandiri, bioflok, bantuan minapadi, bantuan benih dan induk unggul, bantuan prasarana dan kebijakan lainnya yang menjadi pemicu naiknya harga jual ikan budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya. Kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah harga pakan yang cukup tinggi sementara pakan merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%). Selain itu, naiknya

harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari semakin melemahnya nilai rupiah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi.

GAMBAR 3.4. BANTUAN BIOFLOK, BENIH DAN PAKAN PADA PROGRAM BUDIDAYA TAHUN 2019



Rencana aksi untuk peningkatan NTPi diantaranya adalah (i) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan bahan baku, penyediaan mesin pelet, dan pembinaan ke pembudidaya dan memperbanyak percontohan untuk budidaya pakan mandiri yang diharapkan dapat mengurangi biaya penggunaan pakan; (ii) pengembangan teknologi biofloc untuk menekan Food Conversion Ratio (FCR) guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya; dan (iii) membantu penyediaan benih dan induk unggul serta bantuan sarana dan prasarana budidaya.

B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan

IKU 3 Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)

Memastikan penyediaan bahan makanan yang mengandung protein ikan dapat dilihat jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan protein ikan. Dalam hal ini, DKP Aceh menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangga (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan dan makanan jadi), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah makan, hotel, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, ikan kayu dll.

TABEL 3.4. CAPAIAN ANGKA KONSUMSI IKAN TAHUN 2017-2019

Sasaran Strategis-2		Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Bahan Makanan Protein Ikan					
IKU-3		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)					
REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019			% KENAIKAN 2018-2019	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN			
51,40	57,89	53,60	58,97	110,02	1,83	58,64	100,56

Sumber : BPS dan DRKA, 2019 (diolah DKP Aceh)

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2019 adalah 58,97 kg/kapita/tahun, atau naik 1,83% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang besarnya 57,89 kg/kapita/tahun. Capaian tahun 2019 telah memenuhi target sebesar 53,60 kg/kapita/tahun atau mencapai 110,02% dari target. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra DKP Aceh Tahun 2018-2022, yang besarnya 58,64 kg/kapita, maka capaian tahun 2018 telah tercapai 100,56% dari target tahun 2022.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan nasional antara lain :

- Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada Giat OASE dalam rangka kedatangan Ibu negara Iriana Jokowi dan Ibu Mufida Yusuf Kala (31 Januari 2019) di Kota Banda Aceh;
- Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada rumah sekolah (5 Februari 2019) di Kabupaten Aceh Tamiang, (5 Maret 2019) di Kabupaten Pidie Jaya, (6 Maret 2019) di Kabupaten Aceh Utara, (9 Maret 2019) di Kabupaten Aceh Besar, (19 Maret 2019) di Kabupaten Aceh Jaya, (20 Maret 2019) di Kabupaten Aceh Barat;
- Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka pencegahan Stunting di Provinsi Aceh mulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (2 Maret 2019) di Kota Banda Aceh;
- Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada bakti sosial dari instansi terkait di desa Linge kabupaten Aceh Tengah (30 Maret 2019) dan Bakti sosial PPMG (Pekan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) se Aceh Kerjasama TP-PKK Provinsi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh di Kabupaten Bener Meriah (11- 12 Juli 2019).

GAMBAR 3.5. KEGIATAN GEMARIKAN DALAM MENINGKATKAN KONSUMSI IKAN DI ACEH



C. Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan

IKU 4 Produksi Perikanan (Ton)

Jumlah produksi perikanan merupakan gabungan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau dan laut, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

TABEL 3.5. CAPAIAN PRODUKSI PERIKANAN 2017-2019

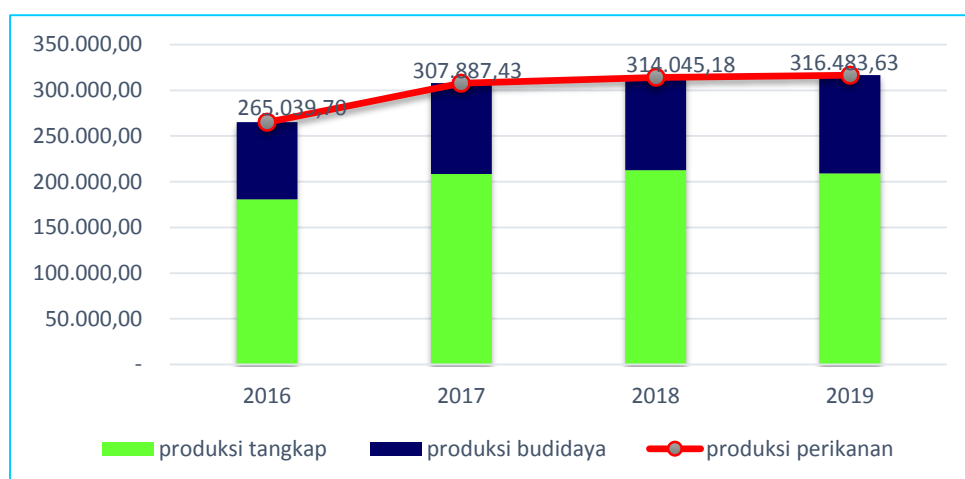
Sasaran Strategis-3		Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan					
IKU-4		Produksi perikanan (ton)					
REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019			% KENAIKAN 2018-2019	TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI*	(%) CAPAIAN			
307.887,43	314.045,18	313.786,79	316.483,63	100,86	0,77	370.250,00	85,48

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2020 (diolah DKP Aceh)

Ket : * data sementara

Produksi perikanan tahun 2019 ditargetkan 313.786,79 ton, dan realisasinya sebesar 316.483,63 ton atau mencapai 100,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 314.045,18 ton, realisasi tahun 2019 telah mengalami kenaikan sebesar 0,77%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra DKP Aceh tahun 2018-2022 yaitu sebesar 370.250 ton, realisasi tahun 2019 telah mencapai 85.48%.

GAMBAR 3.6. PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN SELAMA TAHUN 2016-2019



Produksi perikanan Indonesia tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 0,77 persen dibandingkan tahun 2018, terdiri dari perikanan tangkap yang mengalami penurunan sebesar 1,60 persen dan perikanan budidaya mengalami pertumbuhan sebesar 5,38 persen.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulanan, dan capaian tahun 2019 adalah sebanyak 209.174,39 ton atau mencapai 101,67% dari target tahun 2018 yaitu sebesar 205.741,00 ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 97,00% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 202.899,15 ton dan sisanya sebesar 3,00% atau mencapai 6.275,24 ton berasal dari Perairan Umum Daratan (PUD).

TABEL 3.6. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2016-2019 MENURUT KOMODITAS UTAMA (TON)

NO	Rincian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019*
I	Perikanan tangkap	180.872,60	208.348,64	212.515,61	209.174,39
A	Perikanan Tangkap laut	176.376,91	202.316,13	206.125,48	202.899,15
1	Tuna/Cakalang/Tongkol	101.971,24	110.676,23	111.472,69	110.869,35
2	Kakap	17.427,61	20.588,42	20.855,87	20.625,58
3	Kembung	6.571,17	8.733,68	9.023,53	8.821,34
4	Tenggiri	7.329,88	9.589,74	9.674,84	9.655,25
5	Selar	15.690,05	18.712,50	19.838,41	18.227,88
6	Rajungan dan Kepiting	8.671,72	8.988,46	8.815,76	9.444,13
7	Lobster	4.482,31	4.481,53	4.790,61	4.475,94
8	Ikan Lainnya	14.232,93	20.545,57	21.653,77	20.779,68
B	Perikanan Tangkap PUD	4.495,69	6.032,51	6.390,13	6.275,24
1	Ikan	3.074,59	4.302,78	4.653,86	4.531,37
2	Udang	1.415,22	1.720,41	1.726,75	1.734,14
3	Lainnya	5,88	9,32	9,52	9,73

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2019 (diolah DKP Aceh)

Ket : * sangat sementara

Produksi perikanan tangkap di laut tahun 2018 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas tuna/cakalang/tongkol mencapai 110.869,15 ton, kakap mencapai 20.625,58 ton, kembung mencapai 8.821,34 ton, tenggiri mencapai 9.655,25 ton, selar mencapai 18.227,88 ton, rajungan dan kepiting mencapai 9.444,13 ton, lobster mencapai 4.475,94 ton dan komoditas lainnya mencapai 20.779,68 ton, sedangkan pada perikanan tangkap PUD terdiri dari komoditas ikan 4.531,37 ton, udang 1.734,14 ton, dan jenis lainnya mencapai 9,73 ton. Pertumbuhan perikanan tangkap di laut dan perairan umum berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2019 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Aceh secara total mengalami peningkatan yang fluktuatif, dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2019.

TABEL 3.7. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2017-2019 (TON)

REALISASI		TAHUN 2019*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2017	TAHUN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2017-2019	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
208.348,64	212.515,61	205.741,00	209.174,39	101,67	1,21	231.568,00	90,33

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Volume produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata dari tahun 2017 s.d tahun 2019 dengan periode yang sama sebesar 1,21%. Sedangkan Capaian 2019 terhadap target akhir Renstra 2018-2022 sebesar 231.568,00 ton maka telah tercapai sebesar 90,33%.

Peningkatan volume produksi perikanan tangkap, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di beberapa lokasi;
- bantuan alat tangkap yang terus berlanjut serta bantuan hibah langsung ke kelompok nelayan berupa sarana alat bantu penangkapan ikan seperti alat tangkap jaring gillnet, rumpom laut dalam, GPS, lampu celup, fish finder dan mesin kapal;
- Tindakan tegas terhadap kapal-kapal IUU fishing menyebabkan jalur migrasi ikan yang selama ini tertahan dapat diakses oleh nelayan lokal, sehingga

menumbuhkan fishing ground baru atau peningkatan jumlah tangkapan di fishing ground yang lama; dan

- Sistem perijinan yang lebih mudah.

Untuk memacu peningkatan volume produksi perikanan tangkap, ke depan perlu dilakukan upaya dan kegiatan antara lain optimalisasi operasional bantuan sarana penangkapan ikan, percepatan pembangunan pelabuhan PPI P3D, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, Optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap di pusat-pusat pendaratan termasuk tangkahan, Penguatan pendataan dan penambahan SDM pengumpulan data di area WPP 571 dan WPP 572.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 107.309,24 ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2019 yakni sebesar 108.045,79,24 ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 99,32%. Produksi perikanan budidaya tahun 2019 meningkat sebesar 5,38 persen dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 101.529,57 ton dan kenaikan 7,24% dari tahun 2017.

TABEL 3.8. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2017-2019 (TON)

REALISASI		TAHUN 2019*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2017	TAHUN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% KENAIKAN 2017-2019	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
99.538,79	101.529,57	108.045,79	107.309,24	99,32	4,85	138.682,00	77,38

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Jika dilihat selama periode 2017-2019, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut terus mengalami peningkatan dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 4,85 persen per tahun. Realisasi volume produksi perikanan budidaya tahun 2019 sebesar 107.309,24 ton atau mencapai 77,38% apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2018-2022 yaitu sebesar 138.682 ton.

TABEL 3.9. RINCIAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2016-2019 MENURUT KOMODITAS UTAMA (TON)

NO	Rincian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019*
	Perikanan Budidaya	84.167,10	99.538,79	101.529,57	107.309,24
1	Bandeng	13.978,58	14.320,20	14.446,90	16.101,71
2	Belanak	1.277,43	1.597,69	1.662,11	2.112,47
3	Mas	7.096,44	8.585,54	8.572,42	9.096,21
4	Lele	15.742,17	18.640,89	18.655,77	19.598,21
5	Patin	377,78	401,21	455,98	480,82
6	Nila	11.123,07	12.700,65	13.155,70	13.590,24
7	Kerapu	1.862,82	2.023,23	2.166,25	2.415,51
8	Udang	31.330,56	39.802,72	40.871,63	42.239,06
9	Ikan Lainnya	1.378,25	1.466,66	1.542,81	1.675,00

Sumber : Aplikasi satudata KKP, 2019 (diolah DKP Aceh)

Ket : * sangat sementara

Produksi perikanan budidaya tahun 2019 berdasarkan komoditas utama menunjukkan komoditas udang mencapai 42.239,06 ton, lele mencapai 19.598,21 ton, bandeng mencapai 16.101,71 ton, nila mencapai 13.590,24 ton, mas mencapai 9.096,21 ton, kerapu mencapai 2.415,24 ton, belanak mencapai 2.112,47 ton, patin mencapai 480,82 ton dan ikan lainnya mencapai 1.675 ton. Pertumbuhan perikanan budidaya berdasarkan komoditas utama dalam kurun waktu 2016-2019 dan tahun 2018-2019 menunjukkan bahwa produksi perikanan budidaya di Aceh secara total mengalami peningkatan.

Belum tercapainya produksi perikanan budidaya dari target tahun 2019 antara lain disebabkan oleh perubahan cuaca yang masih ekstrem dan terjadi banjir di beberapa daerah sentra produksi.

Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok dan dengan adanya usaha pembinaan pakan mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi;
- meningkatnya kapasitas Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dalam menyediakan benih yang unggul;

- bantuan pemerintah berupa revitalisasi lahan tambak dan kolam, benih dan pakan, alat produksi budidaya dan lainnya yang dipusatkan berdasarkan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan klaster perikanan budidaya;
- Nilai ekonomis komoditas ikan yang cukup tinggi seperti ikan bandeng, nila, mas, kerapu, dan udang maka pemasarannya masih cukup terbuka.



Produksi Garam

Produksi Garam merupakan penjumlahan dari produksi garam rakyat yang mendapat program PUGAR di 2 Kabupaten (Pidie Jaya dan Aceh Utara), produksi garam rakyat non PUGAR di 6 Kabupaten/Kota. Target produksi garam tahun 2019 berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 19.647,94 ton, lebih besar dari target tahun 2018 sebesar 4.534 ton. Metodologi pendataan garam disusun oleh DKP sedangkan pengumpulan dan validasi Data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait.

TABEL 3.10. CAPAIAN PRODUKSI GARAM TAHUN 2017-2019 (TON)

REALISASI		TAHUN 2019*				RENSTRA DKP 2018-2022	
TAHUN 2017	TAHUN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% PENURUNAN 2018-2019	TARGET	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2019
17.275,00	17.721,50	19.647,94	14.591,00	74,26	17,66	43.166,52	33,80

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Sampai dengan triwulan IV tahun 2019, produksi garam mencapai 14.591 ton. Target produksi garam pada tahun 2019 sebesar 19.647,94 ton dan hanya tercapai 14.591 ton atau mencapai 74.26%. Realisasi produksi garam di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 17,66% apabila dibandingkan dengan produksi garam tahun 2018 yaitu sebesar 17.721,50 ton. Apabila dibandingkan dengan target 2022 (Renstra DKP Aceh Tahun 2018-2022), realisasi tahun 2019 baru mencapai sebesar 33,80%. Diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target produksi sebesar 25.542,32 ton di tahun 2020. Penyebab tidak tercapainya produksi garam terhadap target tahun 2019 dikarenakan terjadinya musim hujan yang lebih panjang dan masih banyaknya

petani garam berskala tradisional yang memproduksi garam dengan sistem perebusan. Berikut rincian jumlah produksi garam di kabupaten penghasil garam.

TABEL 3.11. JUMLAH PRODUKSI GARAM (TON) PER KABUPATEN SENTRA GARAM ACEH

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (TON)*
1	Aceh Selatan	19
2	Aceh Barat Daya	47
3	Aceh Besar	399
4	Pidie	4.814
5	Pidie Jaya	1.160
6	Bireuen	5.273
7	Aceh Utara	1.812
8	Aceh Timur	1.067
TOTAL PRODUKSI		14.591

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Pada tahun 2019 produksi garam tertinggi terdapat pada Kabupaten Bireuen sebesar 5.273 ton, kemudian diikuti Kabupaten Pidie sebesar 4.814 ton, Aceh Utara sebesar 1.812 ton, Pidie Jaya sebesar 1.160 ton, Aceh Timur sebesar 1.067 ton, Aceh Besar sebesar 399 ton, Aceh Barat Daya sebesar 47 ton dan Aceh Selatan sebesar 19 ton.

Capaian produksi garam tahun 2019 didukung oleh kegiatan :

- Integrasi lahan garam di 2 kabupaten melalui program bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR);
- Modernisasi produksi garam dari proses perebusan menjadi sistem rumah tunnel;
- Pengembangan usaha garam melalui pembinaan, revitalisasi lahan dan bantuan sarana produksi garam.

GAMBAR 3.7. PELAKSANAAN INTEGRASI LAHAN GARAM DI TAHUN 2019



D. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan neraca perdagangan perikanan

Selama dua tahun yaitu tahun 2018-2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis meningkatkan neraca perdagangan perikanan yaitu dengan melihat tingkat ekspor perikanan Aceh. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menggunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai ekspor perikanan (USD).



Nilai Ekspor Perikanan (USD)

Nilai ekspor perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.

TABEL 3.12. CAPAIAN NILAI EKSPOR PERIKANAN ACEH TAHUN 2019

Sasaran Strategis-4		Meningkatkan neraca perdagangan perikanan				
IKU-6		Nilai ekspor perikanan (USD)				
REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019*			TARGET AKHIR RENSTRA	(%) CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN		
3.987.649,00	4.408.162,00	3.250.000,00	2.986.439,00	91,89	4.552.000,00	65,61

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Pada tahun 2019, realisasi nilai ekspor perikanan sebesar 2,9 juta USD atau telah mencapai 91,89% dari target tahun 2019 yaitu sebesar 3,2 juta USD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 4,4 juta USD, capaian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 32,25%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2022 pada dokumen Renstra DKP Aceh 2018-2022 yaitu sebesar 4,5 juta USD, realisasi tahun 2019 baru mencapai 65,61%. Dengan demikian diperlukan kerja keras untuk dapat mencapai target ekspor di tahun 2020.

Terdapat lima komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor hasil perikanan tahun 2019 yaitu (tuna,tongkol,cakalang) mencapai 1,5 juta USD (51,00%), udang dan

kepiting mencapai 1,1 juta USD (40,08%), kerapu sebesar 208 ribu USD (6,98%), dan lobster sebesar 57 ribu USD (1,94%).

Salah satu penyebab tidak tercapainya nilai ekspor perikanan tahun 2019 dikarenakan terjadi penurunan produksi perikanan tangkap dari komoditas utama seperti ikan tuna dan cakalang, sehingga mempengaruhi volume ekspor hasil perikanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna meningkatkan capaian nilai ekspor antara lain :

- Peningkatan mutu produk kelautan dan perikanan untuk komoditas ekspor yang bernilai ekonomis penting seperti udang, tuna, rajungan dll melalui pengembangan sistem rantai dingin, sertifikasi mutu, dan pemenuhan persyaratan dari negara pengimpor;
- Pengembangan diversifikasi dan penguatan branding produk hasil perikanan;
- Berpartisipasi aktif dalam kerjasama dengan organisasi perdagangan internasional dan pemerintah negara tujuan ekspor dalam rangka peningkatan akses pasar produk perikanan;
- Partisipasi aktif dalam pameran di pusat-pusat pasar produk hasil perikanan dalam maupun luar negeri;
- Pemberantasan illegal fishing sehingga nelayan lokal mampu meningkatkan hasil tangkapan ikan.

E. Sasaran Strategis 5 : Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir

Sasaran startegis ini memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yakni (i) Luas kawasan konservasi perairan (ha), (ii) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%), (iii) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%).



Luas kawasan konservasi perairan

Indikator kinerja Jumlah Luas Kawasan Konservasi merupakan luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan atau dicadangkan sampai dengan tahun 2019.

Penghitungan capaian dilakukan dengan menjumlahkan luas kawasan konservasi yang telah ada dan luas kawasan konservasi baru pada tahun 2019. Target luas kawasan konservasi pada tahun 2019 sejumlah 212.618,89 ha. Capaian luas kawasan konservasi pada tahun 2019 yaitu seluas 150.331,32 ha atau mencapai 70,70 % dari target yang telah ditetapkan di tahun 2019 atau telah terjadi kenaikan luas kawasan konservasi sebesar 0,73 % jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu sebesar 149.228,57 ha. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 pada Renstra DKP Aceh 2018-2022 sebesar 281.100 ha, maka capaian di tahun 2019 mencapai 53,48%, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

TABEL 3.13. CAPAIAN LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)

Sasaran Strategis-5		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir					
IKU-7		Luas kawasan konservasi perairan (ha)					
REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019*			% Kenaikan 2018-2019	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
77.856,66	149.228,57	212.618,89	150.331,32	70,70	0,73	281.100,00	53,48

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Penyebab tidak tercapai target luas kawasan konservasi perairan karena terdapat perubahan lokasi pencadangan kawasan sehingga mengurangi wilayah yang telah direncanakan pada awal tahun 2019.

Berdasarkan analisis di atas, maka upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2020, yaitu identifikasi biofisik dan sosial ekonomi potensi kawasan konservasi baru, yaitu di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang. Hasil identifikasi potensi tersebut diharapkan dapat dicadangkan sebagai kawasan konservasi baru.

Kegiatan pendukung pencapaian target 2019 adalah Identifikasi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholders terkait seperti akademisi, NGO, masyarakat, pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan luasan kawasan Konservasi perairan di Aceh mencapai target 281 ribu Ha.

2. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman merupakan persentase tangkapan ikan yang masih aman di bawah angka Maximum Sustainable Yield (MSY) Aceh yaitu 272.707 ton.

TABEL 3.14. CAPAIAN RASIO LUAS KAWASAN TERHADAP PERAIRAN TERITORIAL (%)

TAHUN	2016	2017	2018	2019*
Produksi Tangkap (ton)	180.873	208.349	212.516	209.174
% terhadap MSY Aceh	66,32	76,40	77,93	76,70

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Pada tahun 2019 jumlah tangkapan ikan aceh mencapai 209.174 ton atau 76.70% dari angka MSY Aceh, dengan jumlah produksi tersebut maka penangkapan ikan di laut Aceh masih dianggap aman, namun dilihat dalam tiga tahun terakhir proporsi tangkapan ikan mengalami fluktuatif dari angka 66,32% pada tahun 2016 menjadi 76,70% pada tahun 2019.

Upaya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menangani keberlangsungan ikan yang aman yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga terjaganya kelestarian ikan di wilayah penangkapan WPP 571 dan WPP 572. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi dilakukan peningkatan produksi dari hasil budidaya payau, tawar maupun laut.

3. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Rasio kawasan lindung terhadap total luas perairan teritorial adalah perbandingan antara luas kawasan yang dilindungi terhadap luas suatu wilayah yang dinyatakan dalam persentase. Kawasan yang dilindungi meliputi luas padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati dan sumber-sumber alam yang terkait, dikelola secara resmi dan efektif.

TABEL 3.15. CAPAIAN RASIO LUAS KAWASAN TERHADAP PERAIRAN TERITORIAL (%)

Sasaran Strategis-5		Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir					
IKU-8		Rasio Luas kawasan terhadap perairan teritorial (%)					
REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019			% Kenaikan 2018-2019	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN 2018-2022
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
1,38	2,64	2,57	2,66	103,42	0,73	4,97	53,48

Keterangan : * Angka sementara Tahun 2019

Pada tahun 2019 rasio kawasan lindung perairan Aceh mencapai 2,66% atau 150.331 ha dari total luas teritorial Aceh sebesar 5.656.300 Ha dan telah melampaui target tahun 2019 sebesar 2,57% atau 103,42%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, luas kawasan konservasi perairan meningkat sebesar 1.102,75 ha dengan rasio sebesar 0,73%.

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan untuk meningkatkan kawasan konservasi antara lain percepatan penyusunan SK Gubernur Aceh tentang penetapan pencadangan kawasan konservasi perairan Aceh, melakukan sosialisasi kawasan konservasi bagi masyarakat perikanan dan penanaman mangrove.

3.3. Kinerja Anggaran DKP Aceh

Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup DKP Aceh kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pada tahun 2019, Nilai Kinerja Anggaran ditargetkan sebesar 85,00%/kategori baik, dan telah terealisasi sebesar 79,91%/kategori cukup atau 94,00% dari target. Apabila dibandingkan dengan realiasi tahun 2018 yaitu sebesar 62,67%, realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 21,57%.

TABEL 3.16. CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN DKP ACEH TAHUN 2019

KINERJA ANGGARAN					
REALISASI 2017	REALISASI 2018	2019			% KENAIKAN 2018-2019
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
88,80	62,67	85,00	79,91	94,01	21,57

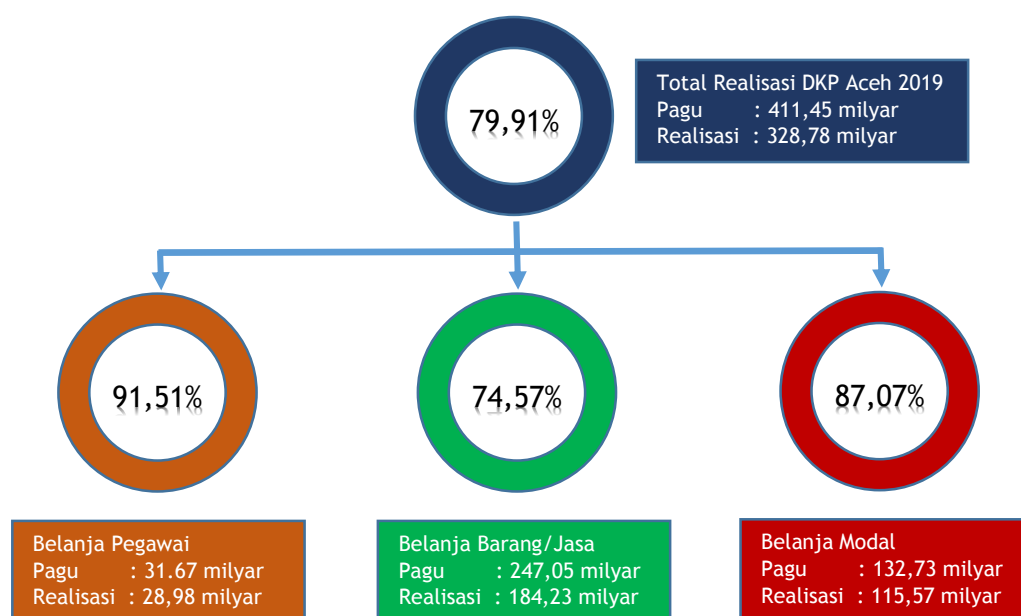
APBA DKP tahun 2016 sampai 2018 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap eselon III lingkup DKP Aceh, baik yang dilaksanakan oleh Dinas, maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Alokasi anggaran tahun 2019 digunakan untuk pembiayaan rutin (belanja pegawai dan operasional perkantoran) sebesar 8,2%, belanja untuk stakeholder langsung sebesar 91,8%. Perkembangan pagu dan realisasi DKP sebagaimana tabel berikut.

TABEL 3.17. PAGU DAN REALISASI APBA DKP ACEH TAHUN 2016-2019

TAHUN	2016	2017	2018	2019	% Kenaikan 2018-2019
Pagu Anggaran (Rp.)	296.013.708.792	296.517.235.403	332.118.468.193	411.446.086.460	19,28
Realisasi Anggaran (Rp.)	273.442.448.110	263.316.842.585	208.154.901.876	328.776.341.415	
(%)	92,37	88,80	62,67	79,91	21,57

Kinerja realisasi APBA DKP tahun 2016-2019 mengalami fluktuatif, namun menunjukkan kinerja yang positif dari tahun 2018-2019 yaitu pada tahun 2018 mencapai 62,67% dan tahun 2019 mencapai 79,91%.

GAMBAR 3.8. REALISASI APBA DKP ACEH 2019 PER JENIS BELANJA



Realisasi anggaran tahun 2019, yang mencapai 79,91%, dengan rincian realisasi per jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 31,67 milyar atau mencapai 91,51%, belanja barang/jasa sebesar Rp. 184,23 milyar atau mencapai 74,57% dan Belanja modal sebesar 132,73 milyar atau telah mencapai 87,07%.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 diantaranya :

1. Proses pengadaan barang dan jasa masih terjadi banyaknya gagal lelang sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kontrak;
2. Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan nomenklatur dan perubahan rencana kerja (Renja) dalam rangka mengakomodir anggaran yang belum teralokasi di tahun 2019;
3. Adanya kendala pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain ketersediaan bahan, keterbatasan SDM, kesiapan pihak penyedia, banjir, cuaca buruk;
4. Adanya pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan oleh beberapa unit eselon III lingkup DKP Aceh;
5. Terdapat beberapa pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, namun belum diusulkan penyelesaian tagihannya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan realisasi anggaran diantaranya:

1. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Penyusunan anggaran telah memperhatikan urutan prioritas program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan **“Aceh Hebat”** yang tercantum dalam dokumen RPJMA;
3. Meminta kesanggupan penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
4. Seluruh kegiatan pada Eselon III lingkup DKP Aceh dapat dilakukan pemantauan oleh Tim Monev untuk pendampingan secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada unit kerja/mitranya masing-masing;
5. Memastikan seluruh pekerjaan dibayar sesuai dengan penyelesaian fisiknya.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Aceh. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMA 2017-2022. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu alat Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh perlu mengantisipasi perubahan di tahun 2020 yang berpotensi mempengaruhi capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama.

Sepanjang tahun 2019, Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya capaian Kinerja beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun demikian, beberapa Indikator Kinerja Utama masih belum tercapai atau memerlukan kerja keras untuk dapat mencapainya di tahun 2020 disebabkan pencapaiannya Indikator Kinerja Utama tersebut mengalami perlambatan. Secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis DKP Aceh Tahun 2019 sebesar 97,65%. Dari 5 Sasaran Strategis, terdapat satu Sasaran Strategis yang nilainya di atas 100% dan empat Sasaran Strategis masih di bawah 100%. Adapun sasaran strategis yang nilainya di atas 100% adalah Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein

ikan (110,02%). Sedangkan, yang nilainya di bawah 100% yaitu Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan (98,28%), Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan (87,56%), Meningkatkan neraca perdagangan perikanan (91,89%) dan Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir (94,74%).

Pada tahun 2019, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengelola anggaran sebesar Rp. 411.446.086.460,- atau terdapat pengurangan sebesar Rp. 6.472.278.969,- apabila dibandingkan dengan DPA awal DKP Aceh yaitu sebesar Rp. 417.918.365.429,- yang terbagi menjadi 11 program pembangunan. Sampai dengan Januari 2020 realisasi anggaran mencapai Rp. 328.776.341.415,- atau 79,91%.

Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, melalui penajaman program dengan mengedepankan aspek keberpihakan dan pemerataan antar wilayah. Untuk itu, rencana aksi/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain adalah :

- A. Untuk Bantuan Pemerintah DKP Aceh kedepan, penyaluran bantuan agar berfokus untuk pencapaian pendapatan pembudidaya ikan yang masih rendah, sehingga diharapkan di tahun 2020 mengalami peningkatan pada nilai capaian NTPi yang masih rendah.
- B. Dalam rangka mendukung sasaran strategis, meningkatkan produksi perikanan dan kelautan, perlu adanya pengembangan budidaya payau, dengan meningkatkan bantuan agroinput benih ikan unggulan dan pakan. Sedangkan pada penangkapan ikan perlu ditingkatkan bantuan boat/perahu dan alat bantu penangkapan, yang pada tahun 2019 banyak kegiatan ini yang tidak terealisasi oleh bermacam faktor.
- C. Pembangunan sentra kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan mutu hasil perikanan, ikut partisipasi dalam pameran produk perikanan nasional maupun internasional dan akses permodalan sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan Aceh.
- D. Identifikasi biofisik dan sosial ekonomi potensi kawasan konservasi baru, yaitu di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tamiang. Hasil

identifikasi potensi tersebut diharapkan dapat dicadangkan sebagai kawasan konservasi baru.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CUT YUSMINAR, A.Pi, M.Si**
 Jabatan : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh**

selanjutnya disebut pihak pertama

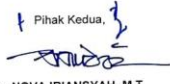
Nama : **Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T**
 Jabatan : **Pjt. Gubernur Aceh**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T

Banda Aceh, 2019

Pihak Pertama,



CUT YUSMINAR, A.Pi, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	99,75 98,50
2.	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	3. Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	53,60
3.	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	4. Produksi Perikanan (ton) a. Produksi Perikanan Tangkap (ton) b. Produksi Perikanan Budidaya (ton) 5. Produksi Garam (ton)	313.786,91 205.741,12 108.045,79 19.647,94
4.	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	6. Nilai Ekspor Perikanan (US\$)	3.250.000
5.	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	7. Luas kawasan konservasi perairan (ha)	212.618,89

Program

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan : Rp 186.730.144.777

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap : Rp 165.363.638.629

3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan : Rp 879.051.579

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil : Rp 9.695.426.048

5. Program Peningkatan Nilai Tambah Produksi Perikanan : Rp 11.610.323.417

6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan : Rp 6.571.780.450

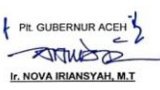
Banda Aceh, 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH



CUT YUSMINAR, A.Pi, M.Si
 NIP. 1962110198603 2 004

Pt. GUBERNUR ACEH



Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,87	99,75	101,90	102,16
		Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	92,96	98,50	92,99	94,40
2	Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	57,89	53,60	58,97	* 110,02
3	Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan	Produksi Perikanan (ton)	314.045,18	313.786,79	316.483,63	* 100,86
		- Produksi Perikanan Tangkap (ton)	212.515,61	205.741,00	209.174,39	* 101,67
		- Produksi Perikanan Budidaya (ton)	101.529,57	108.045,79	107.309,24	* 99,32
		Produksi Garam (ton)	17.721,50	19.647,94	14.591,00	* 74,26
4	Meningkatkan neraca perdagangan perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	4.408.162,00	3.250.000,00	2.986.439,00	91,89
5	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	149.228,57	212.618,89	150.331,32	** 70,70
		Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	77,93	69,67	76,70	110,09
		Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	2,64	2,57	2,66	103,42

3. Penghargaan



“Penghargaan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai Juara Harapan 2 Kategori Menu Kudapan Lomba Inovasi Menu Masakan Berbahan Baku Tingkat Nasional Ke-5” diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.